

**PENGEMBANGAN GBPP SMU MATERI PPkn
DALAM PLURALITAS KEAGAMAAN
(Perspektif Pendidikan Islam)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Tarbiyah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Strata Satu Pendidikan Islam**

Oleh:

**MUHAMAD LUKMAN
9641 3237**

**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
JOGJAKARTA
2003**

NOTA DINAS

Drs. Moch Fuad
Dosen Fakultas Tarbiyah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Hal : Skripsi
Lamp. : 6 Eksemplar

Kepada Yth. :
Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Dosen Pembimbing, berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama	: Muhamad Lukman
NIM.	: 9641 3237
Jurusan	: Pendidikan Agama Islam
Judul	: PENGEMBANGAN GBPP. SMU MATERI PPkn DALAM PLURALITAS KEAGAMAAN (PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM)

Sudah dapat diajukan untuk dimunaqosyahkan di depan sidang munaqosyah. Selanjutnya, harapan kami semoga dalam waktu yang dekat ini, saudara tersebut di atas dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Agustus 2003
Pembimbing,



Drs. Mochamad Fuad
NIP. 150 234 516



DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS TARBIYAH

Jln. Laksda Adisucipto, Telp. : 513056, Yogyakarta 55281
E-mail : ty-suka@yogya.wasantara.net.id

PENGESAHAN

Nomor : IN/I/DT/PP.01.1/108/2003

Skripsi dengan judul : Pengembangan GBPP SMU Materi PPkn
Dalam Pluralitas Keagamaan (Perspektif
Pendidikan Islam)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Muhamad Lukman

NIM : 96413237

Telah dimunaqosyahkan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 9/9-2003

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Tarbiyah
IAIN Sunan Kalijaga

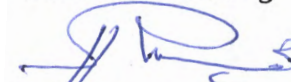
SIDANG DEWAN MUNAQOSYAH

Ketua Sidang


Drs. Moch Fuad

NIP. : 150 234516

Sekretaris Sidang


Drs. Radino M. Aq

NIP. : 150 268798

Pembimbing Skripsi


Drs. Moch Fuad

NIP. : 150 234516

Penguji I


Dra. Hj. Siti Barirotun

NIP. : 150 028801

Penguji II


Drs. Sabaruddin M. Si

NIP. : 150 269254

Yogyakarta, 18 Desember 2003



IAIN SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS TARBIYAH
DEKAN



MOTTO

خيركم من تعلم القرآن وعلمه

(رواه ابن ماجه)

Sebaik-baik kamu sekalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain (HR. Ibnu Majah)¹

... قوّا أنفسكم وأهليكم نارا ...

(التحريم : ٦)

... perliharalah dirimu dan keluargamu dari jeratan api neraka ...²

¹ Abdullah Shonhaji, dkk., *Terjemahan Sunan Ibnu Majah*, Jilid I, (Semarang, Asy-Syifa, 1992), hal- 170

² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Badan Wakaf Jakarta 1995), hal-

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين،
وعلي اله وصحبه اجمعين، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل
عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “Pengembangan GBPP. SMU Materi PPkn Dalam Pluralitas Keagamaan (Perspektif Pendidikan Islam)”.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian tugas dan persyaratan guna meraih gelar Sarjana Strata Satu Pendidikan Islam, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Mengingat masih terbatasnya pengetahuan, kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki, maka sudah barang tentu skripsi ini masih banyak kekurangan serta masih jauh dari kesempurnaan. Namun berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penyusunan skripsi dapat penulis selesaikan.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

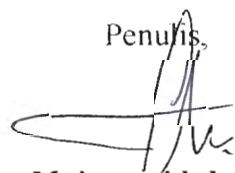
1. Bapak Drs. H. Rahmat M.Pd. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mengesahkan dan menyetujui penyusunan skripsi ini.

2. Bapak Drs. Mochamad Fuad, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan dosen pembimbing yang telah membimbing dalam penyelesaian skripsi ini
3. Bapak Drs. Radino M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Agama Islam, yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis.
5. Kepala TU Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta stafnya yang telah membantu penulis dalam berbagai macam urusan administrasi.
6. Kepala UPT IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta stafnya.
7. Bapak dan Ibu Beserta Kakak dan adik yang telah memberikan dorongan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan,
8. Rekan-rekan yang telah membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini, terutama rekan-rekan PAI - 1 '96 yang telah memberikan suport kepada penulis.
9. Serta semua pihak yang ikut membantu terselesainya penulisan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Dan juga semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Yogyakarta, 30 Juli 2003

Penulis,



Muhamad lukman

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PANDAHULUAN	1
A. Penegasan Istilah	1
B. Latar Belakang Masalah	5
C. Rumusan Masalah	13
D. Alasan Pemilihan Judul.....	13
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
F. Kajian Pustaka	14
G. Kajian Teoritik	16
H. Metode Penelitian	38
I. Sistematika Pembahasan	42

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PANDAHULUAN	1
A. Penegasan Istilah	1
B. Latar Belakang Masalah	5
C. Rumusan Masalah	12
D. Alasan Pemilihan Judul.....	13
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
F. Kajian Pustaka	14
G. Kajian Teoritik	16
H. Metode Penelitian	38
I. Sistematika Pembahasan	41

BAB II	KONSEP PENGEMBANGAN GBPP. PPkn DALAM PLURALITAS KEAGAMAAN	43
	A. Konsep Pengembangan	43
	B. GBPP. PPkn SMU	48
	C. Pelaksanaan Pembelajaran PPkn.....	55
	D. Materi PPkn dalam Pluralitas Keagamaan	63
BAB III	PENGEMBANGAN GBPP. PPkn DAN PLURALITAS KEAGAMAAN	74
	A. Pengembangan GBPP PPkn.....	74
	B. Konsep GBPP PPkn dalam Perspektif Pendidikan Islam.....	97
	C. Tanggapan Masyarakat.....	106
BAB IV	PENUTUP.....	111
	A. Kesimpulan	111
	B. Saran-Saran	112
	C. Kata Penutup.....	114
DAFTAR PUSTAKA		115
CURRICULUM VITAE		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Istilah

Untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan judul di atas, maka penulis memberikan penegasan istilah dan batasan masalah yang tercantum dalam judul skripsi ini ;

1. Pengembangan GBPP PPkn.

Dalam Kamus Besar Indonesia, Pengembangan yang berarti proses, cara, perbuatan mengembangkan.¹ sedangkan Garis-Garis Besar Program Pengajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: “adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk prilaku dalam kehidupan sehari-hari siswa, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Prilaku yang dimaksud, seperti yang tercantum dalam penjelasan Undang-Undang dasar sistem pendidikan nasional 39 ayat (2) yaitu prilaku yang memancarkan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, prilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, prilaku yang mendukung persatuan bangsa dalam masyarakat yang beranekaragam kepentingan, prilaku yang mendukung

¹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hal - 473.

kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran, pendapat, ataupun kepentingan diatasi melalui musyawarah dan mufakat, serta prilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Juga membekali peserta didik dengan budi pekerti, pengetahuan dan kemampuan dasar hubungan antar warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar dapat menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.²

2. Pluralitas Keagamaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pluralitas berarti keadaan masyarakat yang majemuk dengan sistem sosial dan politik.³ Sedangkan keagamaan mempunyai arti sesuatu yang berhubungan dengan agama.⁴ pluralitas keagamaan yang dikemukakan oleh John Hick adalah sebuah ajakan untuk dikembangkannya toleransi, ajakan untuk menjalin hubungan baik antar agama dalam rangka mencegah terjadinya arogansi dan menghargai antar pemeluk agama dalam menjalankan ajaran agamanya dan kepercayaan masing-masing.⁵ Pluralitas keagamaan menurut Badan Penelitian Pengembangan Agama (PPKHUB) pertama adalah sikap kehadiran orang lain atas dasar konsep hidup berdampingan secara damai yang diperlukan sikap tidak saling mengganggu. Kedua mengembangkan sikap kerjasama sosial keagamaan melalui berbagai yang mendorong

² Depdikbud, *Kurikulum PPkn SMU GBPP*, (Jakarta, Depdikbud, 1997), hal-1

³ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta Balai Pustaka, 1994), hal – 777

⁴ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta Balai Pustaka, 1994), hal – 77

proses pengembangan kehidupan beragama yang rukun. Ketiga adalah mencari dan mengembangkan dan merumuskan titik temu agama-agama untuk menjawab problem, tentang keprihatinan umat manusia. Berkaitan dengan; Pertama membangun kebersamaan masyarakat Indonesia, Kedua perwujudan nyata dari kondisi kebersamaan masyarakat Indonesia, Ketiga merupakan landasan “teologis” bagi masing-masing umat untuk membangun sebuah masyarakat dimana semua orang dapat hidup bersama dalam semangat persamaan dan persatuan umat manusia.⁶ Sedangkan pluralitas keagamaan dalam pendekatan Ahmad siddiq menempatkan persaudaraan agama, persaudaraan sebangsa, persaudaraan sesama umat manusia dalam satu nafas, tidak adanya pertentangan dengan masing-masing mempunyai tempat dan relevansinya sendiri dalam kehidupan kita sebagai manusia pribadi dalam berbangsa dan bernegara dalam negara kesatuan Republik Indonesia.⁷

3. Perspektif Pendidikan Islam

Perspektif dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti cara melukiskan sesuatu, sudut pandang (pandangan), cara pandang dari sudut bahasa yang saling berhubungan dengan yang lain dari dalam suatu system.⁸ Pendidikan Islam proses penyampian materi-materi ajaran Islam

⁵ Muhamad Legenhausen, *Satu Agama Atau Banyak Agama*, (Jakarta. Lentera. 2002) hal - 43

⁶ Badan penelitian Hubungan Antar Agama PPKHUB, *Pluralitas Sosial Dan Hubungan Antar Agama*, Jakarta 1999-2000), hal- 14

⁷ *Ibid*, hal- 14

⁸ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal- 864.

kepada anak didik dalam proses pertumbuhannya,⁹ bimbingan yang dilakukan oleh seorang dewasa kepada terdidik dalam masa pertumbuhan agar ia memiliki kepribadian muslim.¹⁰ Sedangkan pendidikan Islam yang dikemukakan Abu Tauhid adalah mempersiapkan dan menumbuhkan anak didik atau individu manusia yang prosesnya berlangsung secara terus menerus semenjak manusia lahir hingga meninggal dunia, yang dipersiapkan dan ditumbuhkan meliputi badannya, akalanya, dan rohaninya sebagai satu kesatuan yang utuh tanpa mengesampingkan salah satu aspek dan melebihkan aspek yang lain. Dan diarahkan agar ia menjadi manusia yang berdaya guna dan berhasil guna bagi dirinya sendiri dan bagi umatnya serta dapat memperoleh kehidupan yang sempurna.¹¹ Aktifitas dan usaha meningkatkan kepribadian Muslim dengan jalan membina potensi-potensi rohani (pikiran, karsa, cipta, dan budi nurani) dan jasmani (panca indra dan ketrampilan-ketrampilannya), lembaga yang bertanggung jawab menetapkan cita-cita (tujuan pendidikan), isi, sistem dan organisasi pendidikan, lembaga-lembaga ini meliputi keluarga, sekolah dan masyarakat. Adanya tingkat kemajuan masyarakat dan budaya yang tidak menyimpang dari ajaran agama Islam.¹²

Dari penegasan istilah judul skripsi di atas, maksud dari penelitian skripsi ini adalah penelitian tentang cara proses pembelajaran materi PPkn Sekolah Menengah Umum dengan mengembangkan GBPPnya, agar

⁹ Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 1998). Hal- 12

¹⁰ *Ibid.* Hal- 11

¹¹ *Ibid.* hal- 13

¹² Zuhairini, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Bumi Aksara Jakarta 1984), hal- 154.

menempatkan hasil sesuai tujuan berdasarkan agama-agama yang berlaku di Indonesia. Sedangkan pembahasannya didasarkan pada konsep pandangan pendidikan Islam, konsep dan pandangan pendidikan Islam dalam pembahasan skripsi ini meliputi; Pertama pendidikan Keimanan yang pertama dan utama untuk dilakukan adalah pembentukan keyakinan kepada Allah yang diharapkan dapat melandasi sikap, tingkah laku dan kepribadian anak didik. Kedua pendidikan Akhlaq (moral), sejalan dengan pembentukan keimanan maka diperlukan pembentukan akhlak yang mulia, pembentukan akhlak pada anak didik sebagai pondasi dalam pergaulan dalam masyarakat. Dan yang ketiga pendidikan Ibadah, yaitu pengertian yang lebih luas adalah hubungan dengan laku manusia meliputi kehidupan yang paling beradab, dari segi pandangan keagamaan mematuhi ajaran agama dalam perbuatan anak didik.¹³

B. Latar Belakang Masalah

Dasar bhineka tunggal Ika yang berarti walaupun Berbeda-beda tetap satu, istilah ini menjadi semboyan bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara.¹⁴ Semboyan ini digunakan untuk melahirkan semangat persatuan bangsa, dan memberi pesan agar keanekaragaman bangsa Indonesia senantiasa dipelihara dan dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dalam menjalani

¹³ *Ibid*, hal- 153-158

¹⁴ Susanto Puspowardoyo, *Sosiologi Antropologi*, (Jakarta. Bumi Aksara, 1998), Hal - 25.

hubungan berbangsa dan bernegara, dalam koridor negara kesatuan Republik Indonesia

Keanekaragaman bangsa Indonesia terlihat pada keadaan letak geografis dan latar belakang etnis, budaya dan agama.¹⁵ Sehingga masyarakat yang tinggal di setiap lingkungan tersebut akan dipengaruhi kondisi riil tentang geografis, etnistas, budaya dan agama. Faktor-faktor ini bagian yang mendasari terjadinya keanekaragaman bangsa Indonesia.

Diperlukan usaha untuk menumbuhkan kesadaran untuk menerima perbedaan sebagai realitas natural maupun kultural sepanjang fungsional sifatnya dan tidak melecehkan harkat dan martabat kemanusiaan, pluralisme tentu saja lahir dari kesadaran dan kesediaan menerima perbedaan sebagai unsur kreatif masyarakat sebagai sebuah kesatuan yang mengandung kemajemukan.¹⁶

Pada dataran yang paling penting, persoalan atau masalah keanekaragaman bangsa Indonesia terlihat dari banyaknya agama yang dianut masyarakat Indonesia. Pluralitas agama merupakan kenyataan hidup dalam masyarakat Indonesia.¹⁷ Oleh karena itu kehidupan beragama termasuk salah satu hal yang amat peka serta harus diupayakan adanya keserasian dalam kehidupan berbangsa.

Agama mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia dan bangsa, agama tidak hanya memberikan program dan pegangan hidup kepada

¹⁵ *Ibid*, hal- 26

¹⁶ Badan Penelitian Pengembangan Agama, *Pluralitas Sosial dan Hubungan Antar Agama*, (Jakarta 1999), hal- 12

¹⁷ Neiny Ratnaningsih, *PPkn SMU*, (Jakarta; Grafindo Media Pratama), hal- 2

manusia, tetapi juga memotivasi dan sumber berbagai pikiran dan saran yang kreatif dan positif. Oleh karena itu, harus diarahkan dengan baik dan benar agar mampu menimbulkan pikiran dan tindakan yang positif dan bermanfaat.

Pemerintah berkewajiban memberikan kesempatan dan dorongan tumbuhnya kehidupan beragama yang sehat di negara Indonesia. upaya menumbuhkan kerukunan antar umat beragama menuntut partisipasi seluruh warga negara Indonesia. Setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk membina ketertiban dan keamanan nasional yang di dalamnya terkandung kerukunan umat beragama sebagai aspek penting terwujudnya ketahanan nasional yang tangguh.¹⁸

Dalam penjelasan pasal 39 ayat (2), Undang-undang No. 2 tahun 1989, tentang pendidikan nasional. Disebutkan bahwa, Pendidikan Pancasila mengarah perhatian kepada moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam Masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama. Perilaku yang bersifat kemanusiaan, yang beraneka ragam kepentingan, perilaku yang mendukung kerakyatan, yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan dan perorangan, serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁹

¹⁸ Depdikbud, *PPkn SMU*, hal- 30

¹⁹ *Ibid*, hal- 13

Pendidikan kewarganegaraan merupakan usaha membekali peserta didik dengan kemampuan dasar yang berkenaan dengan hubungan antar warga negara dengan negara, serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

Garis-garis Besar Haluan Negara 1993 mengamanatkan bahwa "bahwa penyelenggaraan pendidikan nasional harus mampu meningkatkan, memperluas dan memantapkan usaha penghayatan dan pengamalan Pancasila serta membudayakan nilai-nilai pancasila agar diamalkan dalam kehidupan sehari-hari di segenap lapisan masyarakat". ditingkatkan dan diperluas melalui pendidikan, dan keteladanan serta upaya lainnya disemua lapisan masyarakat. Upaya ini perlu disertai dengan perbaikan metode dan perluasan materi wawasan kebangsaan dalam pemantapan pendidikan politik dan Pancasila dalam Undang-undang Dasar 1945.²⁰

Dengan demikian, maka peran dan pengaruh agama semakin menempatkan posisi dan pengaruhnya yang cukup kuat, baik dalam konflik politik, ekonomi maupun ideologi, yang makin mencuatnya krisis kredibilitas dan vitalitas agama. Dalam realitasnya, ekspresi keberagamaan yang kerap muncul terjadinya konflik adalah ekspresi keberagamaan yang monolitik, eksklusif, konserfatif, bahkan suka memonopoli kebenaran agama.

PPKn salah satu bidang studi yang wajib diberikan pada program pendidikan disemua jenjang, cara pelaksanaannya atau penyampaiannya

²⁰ *Ibid*, hal- 36

memerlukan mengarahkan pada pembentukan moral anak didik, yang diwujudkan dalam perilaku sehari-hari.

Melalui pendidikan PPKn, siswa diharapkan mampu mengembangkan potensinya, baik sebagai pribadi yang beragama, anggota masyarakat, bangsa dan negara maupun sebagai anggota masyarakat dunia, melalui PPKn ini para siswa juga dibekali pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antar warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara.²¹

Pendidikan Islam harus mampu memfungsikan dirinya untuk mengarahkan dan membentuk moral masyarakat sesuai dengan konsep pluralitas. Sehingga pendidikan Islam banyak memberikan tawaran, pendekatan dan kontribusi sesuai dengan fungsinya, merespon setiap persoalan yang muncul serta mengambil solusi terhadap persoalan-persoalan tersebut.²²

Posisi PPkn ditingkat Sekolah menengah Umum, sebagai problem pemahaman pluralitas keagamaan, pada masa remaja anak didik mulai bersikap kritis terhadap permasalahan yang timbul di masyarakat, dan melalui pemahaman pendidikan Islam, diharapkan pemikiran kritis Anak didik dapat berkembang pemahaman pluralitas keagamaannya. Dan dapat memposisikan dirinya dalam kehidupan beragama di masyarakat, sesuai dengan fungsi pendidikan PPkn ;

²¹ Suardi Abu Bakar dkk, *PPkn SMU*, (Jakarta; Yudistira, 1998), hal- 4.

²² *Ibid*, hal- 175.

1. Mengembangkan dan melestarikan nilai dan moral pancasila secara dinamis dan terbuka, dinamis dan terbuka dalam arti bahwa nilai dan moral yang dikembangkan mampu menjawab tantangan perkembangan yang terjadi di masyarakat, tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia, yang merdeka, besatu dan berdaulat.
2. Mengembangkan dan membina manusia Indonesia seutuhnya yang sadar politik dan konstitusi ; Negara kesatuan Republik Indonesia berlandaskan pancasila dan UUD 1945.
3. Membina hubungan antar warga negara dengan negara, antara warganegara dengansesama warganegara, dan pendidikan pendahuluan bela negara agar mengetahui dan mampu melaksanakan dengan baik hak dan kewajibannya sebagai warganegara.²³

Pendidikan Islam dalam melihat permasalahan pluralitas keagamaan yang terjadi di Indonesia dalam pendidikan materi PPkn, pendidikan Islam melihat tiga hal ;²⁴

1. Manusia sebagai ciptaan Allah yang sempurna. (At-tin ; Ayat 4)

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

“Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.”²⁵

²³ Depdikbud, *Kurikulum SMU GBPP PPkn*, (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta. 1997), hal- 1.

²⁴ Zuhairini, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Bumi Aksara Jakarta 1984), hal- 164

²⁵ Depaq, *Al-Quran dan Terjemahan* (Depaq. Jakarta 1971), hal- 1076

2. Manusia sebagai “Khalifah Fil Ardl” (Yunus ; Ayat 14)

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ
كَيْفَ تَعْمَلُونَ

“Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) dimuka bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat”²⁶

3. Islam sebagai agama Rahmatan Lil alamin/universal. Mengandung ajaran yang konkret (Al-Maa-idah ; ayat 3)

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

“Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kecukupkan kepadamu nikmatku....(Al-maa'idah 3).”²⁷

Atiyah Al-Abrosyi dalam kajian tentang pendidikan Islam telah menyimpulkan Tujuan asasi manusia dalam “*At Tarbiyah Al-Islamiyah Wa-Falsafatuha*” ;

1. Untuk membantu pembentukan akhlak yang mulia. Islam menetapkan bahwa pendidikan akhlak adalah jiwa pendidikan Islam dan pencapaian akhlak yang sempurna adalah tujuan pendidikan sebenarnya.
2. Persiapan untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, pendidikan Islam tidak hanya menaru perhatiannya pada segi keagamaan dan

²⁶ *Ibid*, hal- 305.

²⁷ *Ibid*, hal- 156.

keduniaan, tetapi pendidikan islam menaruh perhatiannya pada kedua-duanya, dan sebagai tujuan tertinggi dalam pendidikan ;

اعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا وَاعْمَلْ لِآخِرَتِكَ
كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا

“Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selama-lamanya, dan bekerjalah kamu untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok” (Al-hadits)

3. Menumbuhkan ruh Ilmiah (Scientific Spirit) pada pelajaran dan membuka wawasan berfikir untuk mengetahui (Curiosity) dan mengkaji ilmu sebagai ilmu.²⁸

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan menelaah Pengembangan GBPP (Garis-Garis Besar Program Pengajaran) materi PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) saat ini dalam pluralitas keagamaan dalam perspektif pendidikan Islam kemudian menempatkannya sesuai dengan peranannya dalam pengembangan nilai-nilai kemanusiaan, kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas menurut penulis studi tentang pengembangan GBPP SMU materi PPKn dalam Pluralitas Keagamaan dalam perspektif pendidikan Islam merupakan kajian yang cukup menarik, penulis

²⁸ Zuhairi, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Bumi Aksara Jakarta 1984), hal-164

berusaha meneliti dari kajian literer, Ada beberapa pokok masalah yang perlu dirumuskan. Yaitu:

1. Apakah konsep pengembangan GBPP (Garis-Garis Besar Program Pengajaran) materi PPKn (Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaran) SMU sudah sesuai di lihat dari sudut pluralitas keagamaan ?
2. Bagaimana pengembangan GBPP (Garis Besar Program Pengajaran) PPKn di SMU bila ditinjau dari perspektif pendidikan agama Islam ?

D. Alasan Pemilihan Judul

1. Penulis melihat bahwa adanya kasus (konflik) dan gejolak sosial yang terjadi di masyarakat dan adanya indikasi disintegrasi bangsa. Adanya kemunduran dalam berbangsa dan bernegara, hal ini disebabkan karena tidak adanya keseimbangan nilai-nilai kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara.
2. Pluralitas berbangsa dan bernegara dalam konteks masyarakat Indonesia saat ini semakin menunjukkan adanya kekaburan makna dan esensinya sehingga dipahami secara parsial semata.
3. Dalam kasus di atas materi PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) sudah selayaknya mampu meletakkan nilai-nilainya kepada peserta didik khususnya, dan pada masyarakat pada umumnya. Sehingga PPKn tidak hanya sebagai kajian normatif tetapi direlevansikan dengan pendidikan Islam. Sebagai suatu sistem acuan nilai-nilai yang berkembang terhadap peserta didik.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan konsep pengembangan GBPP materi pelajaran PPKn saat ini dalam pluralitas keagamaan.
- b. Mendiskripsikan pengembangan materi PPKn dalam Pluralitas keagamaan di Indonesia dari perspektif pendidikan Islam.

2. Manfaat Penelitian

- a. Dari tinjauan teoritis diharapkan dapat memperdalam pemikiran pendidikan Islam di tengah pluralitas budaya dalam berbangsa dan bernegara.
- b. Dari tinjauan praktis diharapkan dapat menyumbangkan dan menambah wawasan konstruktif dalam mengembangkan sistem pendidikan Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

F. Kajian Pustaka.

Pembahasan khusus mengenai GBPP (Garis Besar Program Pengajaran) SMU (Sekolah Menengah Umum) materi PPKn (Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan) mengenai pluralitas keagamaan yang dilihat dari sudut pandang pendidikan Islam sepengetahuan penulis belum ada yang meneliti dalam kajian literer. Namun demikian, dilingkungan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terdapat beberapa sekripsi yang berkaitan dengan dengan tema tersebut, antara lain :

“Studi Tentang Pelaksanaan CBSA Dalam Bidang Studi Pendidikan Moral Pancasila Di SMP (Sekolah Menengah Pertama)” disusun oleh Purwanto, Skripsi dalam bentuk kajian Penelitian lapangan ini mengupas tentang bagaimana penerapan sistem CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif) dalam materi pendidikan moral pancasila yang diterapkan dan diaplikasikan kepada siswa SMP (Sekolah Menengah Pertama), sehingga siswa dapat memahami dan mengetahui materi yang diberikan sesuai dengan metode CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif)

“Studi Tentang Pelaksanaan Kurikulum Bidang Studi Sejarah Dalam perspektif Pendidikan Islam Di SMU (Sekolah Menengah Umum) Karanganyar” ditulis oleh Budi Sulistio. Skripsi dalam bentuk kajian penelitian lapangan ini membahas tentang, pelaksanaan dan penerapan sistem kurikulum materi Sejarah yang diterapkan di SMU (Sekolah Menengah Umum) Karanganyar sesuai dengan pendidikan Islam.

“Manusia Gadamer Dalam Pandangan Pluralitas Keagamaan Kontemporer” yang di tulis oleh Alim Ruswantoro dan kawan-kawan. Dalam penelitian literer ini membahas mengenai bagaimana Gadamer memandang manusia dalam kemajemukan keberagaman, apalagi pada masyarakat kontemporer dan konteks keindonesiaan. hal ini menjadi realitas yang ada di lingkungan dan masyarakat kita.

Menimbang dari hasil survai pustaka di atas, maka pembahasan yang penulis ajukan mengenai pengembangan GBPP SMU materi PPkn dalam

pluralitas keagamaan (perspektif pendidikan Islam) menjadi penting untuk dilakukan penelitian.

G. Kajian Teoritik

Kaitannya dengan penelitian ini, pembahasan tentang pluralitas keagamaan akan mendapat perhatian tersendiri, mengingat dari hasil pengamatan penulis, maka setiap peserta didik dalam melihat pluralitas keagamaan di Indonesia mempunyai aktifitas pluralitas keagamaan yang berbeda, karena adanya pengaruh dari lingkungan dan budaya Indonesia

1. Garis-Garis Besar Program Pengajaran, Materi Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan.

Manusia menjadi manusia karena pendidikan, dan Imanuel kant juga mengatakan bahwa karena itu pendidikan termasuk upaya memanusiakan manusia, bahwa ciri-ciri manusiawi dalam arti jasmani dan rokhani, tidak secara otomatis dapat dimiliki seseorang, kemampuan-kemampuan manusia adalah hasil belajar dan didikan.²⁹ Oleh karena itu dalam dunia pendidikan perlu di susun materi dalam program pengajaran di sekolah dan hal ini pemerintah sebagai fasilitator dalam pembentukan program pengajaran.

Dalam susunan program pengajaran yang diterapkan oleh pemerintah pada kurikulum jenjang pendidikan SD (Sekolah Dasar), SLTP

²⁹ Tim Dosen IKIP Malang, *Dasar-Dasar Kependidikan*, (Surabaya. Usaha Nasional. 1980), hal - 67

(Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), SMU (Sekolah Menengah Umum) hingga PT (Perguruan Tinggi) terdapat mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan Pendidikan Agama, adapun tujuan pendidikan pancasila mengarah kepada:

- a. Pendidikan moral yang diharapkan dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dimasyarakatkan dapat diaktualisasikan yang lebih luas dalam kehidupan.
- b. Pendidikan kewarganegaraan usaha untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antar warga negara dengan negara dan antar masyarakat.
- c. Adanya hubungan baik antar warga negara dengan negara lain dalam membina hubungan.³⁰

Sedangkan tujuan mata Pelajaran Agama yang diajarkan disetiap sekolah dasar hingga perguruan tinggi berfungsi untuk :

- a. Memperkuat iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut oleh siswa yang bersangkutan.
- b. Dapat memahami ajaran agama dan mengamalkan secara baik dan benar dalam kehidupan di masyarakat.

Kedua mata pelajaran tersebut diharapkan dapat membentuk budi pekerti luhur anak didik, sehingga disamping menghasilkan anak didik

³⁰ Amin Abdullah, *Seminar Makalah Tantangan Kependidikan dalam Pelajaran Kewarganegaraan Dan Keagamaan*, Th 2001

yang cerdas juga mempunyai pekerti luhur dan moral yang baik, mata pelajaran tersebut menjadi dasar dari pelajaran kecerdasan emosional. Pendidik (guru) agar dapat berhasil mengajarkan mata pelajaran PPKn dan agama sebagai dasar mengajarkan kecerdasan emosional anak, maka perlu keteladanan disiplin.³¹

Pemerintah kita telah mengembangkan asas demokrasi dalam pendidikan, dalam hal ini dapat dilihat yang terdapat dalam Undang-undang dasar kita pasal 31 yang berbunyi ;

1. Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.
2. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dalam undang-undang.

Selain disebutkan di dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tentang pendidikan sebagai berikut :

- a. Pendidikan nasional berdasarkan pancasila, bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, ketrampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air, agar dapat menumbuhkan manusia-manusia yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggungjawab atas pembangunan bangsa.³²

³¹ *Ibid*, hal- 4

³² Hamdani Ali, *Filsafat Pendidikan*, (Yogyakarta, Penerbit Kota Kembang, 1986), hal-73

- b. Pendidikan nasional bertujuan meningkatkan kualitas manusia, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, trampil, berdisiplin, ber-etos kerja, profesional, bertanggung jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani, pendidikan nasional juga harus menunjukkan sikap patriotik dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan dan kesetiakawanan sosial serta kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan. Serta berorientasi masa depan, serta iklim belajar mengajar yang dapat menumbuhkan sikap kreatif dan inovatif.³³
- c. Pendidikan nasional perlu ditata, dikembangkan dan ditetapkan dengan melengkapi berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengutamakan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar, serta wajib belajar sembilan tahun.
- d. Pendidikan nasional akan dikembangkan secara terpadu dan serasi, baik antar berbagai jalur, jenis, jenjang pendidikan, disetiap sektor pendidikan dan pembangunan, serta antar daerah, masyarakat sebagai mitra pemerintah berkesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam melaksanakan pendidikan nasional.

³³ Bp-7 Pusat, *UUD Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila GBHN Ketetapan MPR Th 1993*, (Penerbit Bp-7 Pusat 1996), hal- 158

- e. Penyelenggaraan pendidikan nasional harus meningkatkan, memperluas dan memantapkan usaha penghayatan dan pengamalan Pancasila serta membudayakan nilai-nilai Pancasila agar diamalkan dalam kehidupan sehari-hari disegnap lapisan masyarakat, oleh karena itu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan termasuk pengamalan P-4 (pedoman, penghayatan dan pengamalan Pancasila) serta sejarah perjuangan bangsa serta unsur-unsur yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa, semangat dan nilai-nilai perjuangan, khususnya nilai 1945.³⁴
- f. Titik berat pembangunan pendidikan diletakkan pada peningkatan mutu dan perluasan dasar dalam rangka mewujudkan dan memantapkan melaksanakan wajib belajar dan memperluas kesempatan belajar pada tingkat pendidikan menengah.

2. Pluralitas Keagamaan Di Indonesia

Doktrin setiap agama mengajarkan keharmonisan, kedamaian, kerukunan, saling menghormati, menjunjung tinggi prinsip kebersamaan dan seperangkat nilai-nilai luhur lainnya, dalam realitas kultural-sosiologis, doktrin agama, keputusan konsili, atau juga hasil kesepakatan sidang dewan gereja-gereja sedunia, belum dapat sendirinya menjamin terlaksananya kerukunan umat beragama seperti yang diinginkan oleh masing-masing pihak yang memutuskan dan menganjurkannya hubungan

³⁴ *Ibid*, ..hal- 160

antar umat beragama, khususnya dalam masyarakat majemuk selalu diwarnai oleh pasang surut dan tidak selamanya harmonis.³⁵

Keanekaragaman (pluralitas) agama yang hidup di Indonesia, termasuk di dalamnya keanekaragaman paham keagamaan yang ada di dalam tubuh intern umat beragama adalah merupakan kenyataan histories yang tidak dapat dipungkiri oleh siapapun, sebab hal ini merupakan sunatullah.

Proses munculnya pluralitas agama di Indonesia dapat diamati secara empiris histories, secara kronologis dapat di sebutkan bahwa dalam wilayah kepulauan nusantara, hanya agama Hindu dan Budha yang dulu dipeluk masyarakat, terutama di pulau Jawa. Candi Burobudur dan candi Perambanan adalah saksi sejarah yang paling otentik, kenyataannya demikian tidak menepikan tumbuh berkembangnya budaya animisme dan dinamisme baik di Jawa maupun diluar Jawa. Ketika perkembangan agama Islam melalui jalur perdagangan sampai kepulauan nusantara, maka proses perubahan pemeluk (convensi) agama secara bertahap berlangsung. Proses penyebaran dan pemeluk agama Islam dikepulauan nusantara yang berlangsung secara massif dan dengan jalan damai tersebut sampai dicatat oleh Marshall Hodgson sebagai prestasi sejarah dan budaya yang amat sangat mengagumkan dalam keagamaan.

³⁵ Amin Abdullah, *Studi Agama Normativitas atau Historis*, (Yogyakarta.Pustaka pelajar. 1996), hal - 5

Kerukunan umat beragama di Indonesia tidak boleh dilepaskan dari peran pemerintah dalam menciptakan situasi kondusif untuk kerukunan hidup umat beragama, yang tercermin dalam program pemerintah dalam lingkup departemen agama, yaitu untuk menggalang dan membina tiga kerukunan ; kerukunan umat beragama dengan pemerintah, kerukunan antar umat beragama , dan kerukunan antar intern umat beragama.³⁶

Hal itu secara normative tidak ada ajaran agama yang mengajarkan mendorong dan menganjurkan pengikutnya untuk melakukan kekerasan terhadap pengikut ajaran agama lain di luar kelompoknya. Namun secara histories faktual masih dijumpai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sebagian anggota masyarakat dengan dalih agama.³⁷

Dalam masyarakat multi kultural dan multi religius, persoalan sosial-keagamaan merupakan persoalan yang sangat kompleks, persoalan ini dirasakan oleh para politisi, tokoh agama, guru-guru agama, bahkan orang tua di rumah. Untuk itu perlu usaha yang sadar, sungguh-sungguh dan terprogram secara terus menerus mencermati, mengevaluasi, merekonstruksi ulang metodologi dan pola-pola pengkajian agama baik di lingkungan intern maupun eksternal umat beragama.

Upaya ini merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak untuk membekali kesadaran dan ketahanan umat beragama dalam menghadapi berbagai perubahan horizontal maupun vertical dalam

³⁶ *Ibid.* hal - 9

³⁷ *Ibid.* hal - 10

masyarakat, serta untuk memberi bekal cukup dalam menghadapi konflik dalam beragama.

HM Amin Abdullah menyebutkan adanya faktor kepentingan kultur sosiologis yang cukup dominan yang mengalami pasang surutnya hubungan antar umat beragama. Dalam batas-batas tertentu arus kepentingan yang bersifat historia praktis menjadi kesepakatan pemimpin-pemimpin agama, menjadi mandul kering dan formal serta tidak lagi menggugah hati nurani para pengikutnya untuk membangkitkan semangat dalam keberagamaan.³⁸

Bercampur aduknya aspek doktrinal-teologis dalam pergumulan kultural-sosiologis menambah semakin rumitnya persoalan keagamaan pada wilayah historis kemanusiaan "mana doktrin-doktrin yang bersifat normatif yang dilandasi oleh ayat-ayat kitab suci" dan mana yang disebut interpretasi seseorang atau kelompok terhadap doktrin-doktrin yang sering termuat dan tercampur kepentingan kultural-sosiologis, banyak kasus sulit dibedakan, pemikiran apriori dan anggapan, prasangka, praduga.

Teologi telah tumbuh subur dalam masyarakat luas kemudian diperkuat oleh para Da'i, Misionaris, dan Zending dengan landasan kitab suci masing-masing, ini sangat sulit diantisipasi dengan cara-cara konvensional, baik dengan cara mempelajari kembali doktrin agama, maupun secara baik dan jujur mempelajari studi-studi agama-agama.

³⁸ Republika, *Doktrin Agama Dan Kerukunan Umat Beragama*, 19 Mei 2000, hal - 15.

Masing-masing agama menunjukkan hanya agamanya sendiri yang paling rukun dan toleran, baik secara tekstual maupun kontekstual yang agaknya tidak mengurangi ketegangan, tetapi menumbuhkan ketegangan-ketegangan baru di antara pemeluk agama.

Al-Quran sebagai wahyu Allah, dalam pandangan dan keyakinan umat Islam adalah sebagai sumber kebenaran dan mutlak kebenarannya, meskipun demikian kebenaran mutlak itu tidak akan tampak manakala Al-Quran tidak berinteraksi dengan realitas sosial, atau menurut Qurais Shihab dalam bukunya *Membumikan Al-Qur'an* diartikan; dibaca, dipahami dan diamalkan.³⁹

Ketika kebenaran mutlak itu disikapi oleh para pemeluknya dengan latar belakang kultur dan pengetahuan yang berbeda, akan muncul kebenaran-kebenaran parsial. Sehingga kebenaran manusia menjadi relatif sedangkan kebenaran mutlak menjadi milik Tuhan, untuk menggambarkan apa yang diingatkan oleh Allah Seandainya Allah menghendaki kesatuan pendapat, niscaya diciptakan-Nya manusia tanpa akal budi seperti binatang atau benda-benda tak bernyawa yang tidak mempunyai kemampuan untuk memilah dan memilih, karena hanya dengan demikian seluruhnya akan menjadi satu pendapat.⁴⁰

Dari seorang muslim dapat memahami adanya pandangan bahkan pendapat yang berbeda dengan pandangan agamanya, karena semua itu

³⁹ Qurais Shihab, *Membumikan Al-Quran*, (Bandung, Mizan 1996), hal-

⁴⁰ Dadang Khamad., *Sosiologi Agama*, (Penerbit Rosda Bandung, 2000), hal- 173.

tidak mungkin berada diluar kehendak Illahi, kenyataan yang diakui Tuhan tidak akan menggelisahkan atau memaksa orang lain secara halus atau kasar menganut pandangan agamanya.

فَلَعَلَّكَ بَخِيعَ نَفْسِكَ عَلَىٰ آثَرِهِمْ إِن تَمَّ يُؤْمِنُوا
بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا

'Sesungguhnya kasihan jika kamu akan membunuh dirimu karena sedih akibat mereka tidak beriman kepada keterangan ini (Q.S Al-Khafi 18; 6)⁴¹

Dan dalam surat Yunus juga disebutkan ;

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّكُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ
تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Artinya: Dan jikalau Allah menghendaki, tentulah beriman semua orang-yang ada dimuka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu akan memaksa semua manusia agar menjadi orang-orang yang beriman. (Q.S. Yunus. 10; 99)⁴²

Adanya pluralitas pada setiap aspek kehidupan dalam masyarakat baik individu maupun kelembagaan, Al-Quran memberikan petunjuk adanya persaudaraan ;

1. Khalifah, manusia di angkat oleh Allah sebagai khalifah. Kekhalifahan ini menuntut manusia untuk memelihara, membimbing, mengarahkan segala sesuatu agar mencapai maksud dan tujuan dalam beragama.

⁴¹ Depaq, *Al-Quran Terjemahan*, hal - 443

⁴² Depaq, *Al-Quran Terjemahan*, hal - 322

2. Peraudaraan antar pemeluk agama. Al-quran menganjurkan agar mencari titik singgung dan titik temu antar pemeluk agama, dalam berinteraksi sosial, apabila tidak dapat dicari titik temu, maka hendaklah saling menghormati.
3. Persaudaraan sesama Muslim, yaitu saling menyalahkan diantara dua kelompok yang berbeda pendapat.⁴³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَر قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ
أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ

"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengolok-olokkan kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok).....(Q.S. 49: 12)

Dengan sikap seperti itu, tidak berarti kita tidak harus berdiam diri terhadap kemungkinan kesalahan orang lain atau lingkungan di sekitar umat Islam harus melakukan koreksi terhadap semua sikap patologi sosial dalam Islam dikenal dengan *Amar Ma'ruf Nahi mun'kar*, telah ditegaskan dalam Al-Quran.

وَلِكُلِّ وُجْهَةٍ هُوَ مَوْلِيَّهَا فَاسْتَبِقُوا إِلَيْنَا
مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu (dalam berbuat) kebaikan dimana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat) sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu" (Q.S. 2: 148)⁴⁴

⁴³ Dadang Khamad, *Sosiologi Agama*, hal- 174

⁴⁴ Depaq, *Al-Quran Dan Terjemahan*, hal - 148

Mengakui masyarakat terdiri dari berbagai macam komunitas yang memiliki orientasi kehidupan sendiri-sendiri, manusia harus menerima keberagaman budaya dan agama serta memberikam toleransi kepada masing-masing komunitas dalam menjalankan ibadahnya, karena itu kecurigaan tentang sifat Islam yang anti plural, sangatlah tidak beralasan dari segi idiologis, bila setiap muslim mendalami secara mendalam etika pluralistik yang ada di dalam Al-Quran, tidak perlu lagi ada ketegangan dan permusuhan dan konflik dengan agama-agama lain selama mereka tidak saling memaksakan kehendak.⁴⁵

Sikap pluralitas tidak akan menjamin tercapainya kerukunan antar umat beragama yang langgeng. Apabila masyarakat itu sendiri tidak memahami arti kemajemukan, karena itu harus dipahami dalam pluralitas beragama yaitu:

1. Pluralitas tidak semata-mata menunjukan adanya kenyataan tentang adanya kemajemukan, namun yang dimaksud adalah keterlibatan aktif terhadap kenyataan kemajemukan itu. Pluralitas keagamaan dan budaya dapat kita jumpai di masyarakat, kantor, pasar, sekolah. Manusia dapat dikatakan menyandang sifat pluralis, apabila dapat berinteraksi positif dalam lingkungan kemajemukan tersebut, tanpa mempermasalahkan perbedaan.

⁴⁵ Dadang Khamad, *Sosiologi Agama*, hal- 172.

Dengan kata lain, pengertian pluralitas keagamaan bahwa tiap pemeluk agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan hak agama lain, tetapi terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan.

2. Pluralitas harus dibedakan dengan kosmopolitanisme. Hal ini menunjukkan kepada suatu realitas di mana kemajemukan agama, ras, bangsa, hidup berdampingan disuatu lingkungan. Namun interaksi positif khususnya dalam bidang keagamaan sangat minimal antar pemeluk agama.
3. Konsep pluralitas tidak dapat disamakan dengan konsep relativitas. Seorang relativitas akan berasumsi bahwa hal-hal yang menyangkut kebenaran, atau nilai akan ditentukan oleh kerangka pikir seseorang atau masyarakat. Tidak dapat dipungkiri, dalam paham pluralitas terdapat paham relativisme tidak mengklaim kepemilikan tunggal. (monopoli) atas suatu kebenaran, apalagi pemaksaan kebenaran kepada orang lain, paling tidak seseorang pluralitas akan menghindari sikap absolutisme yang menonjolkan keunggulan kepada pihak lain.
4. Pluralitas keagamaan bukanlah sinkretisme, yaitu menciptakan suatu agama baru dengan memadukan unsure tertentu atau sebagian komponen ajaran agama dari berbagai ajaran agama.⁴⁶

Ketika Rasulullah SAW berada di Kota Madinah, apa yang diajarkan oleh Nabi Muhamad bukanlah sebuah legitimasi agama secara

⁴⁶ Alwi Shihab, *Islam Inklusif*, (Penerbit Mizan Bandung, 1999), hal- 41.

resmi negara saat itu, dan bukan menjadi alat pemaksa untuk memaksakan memeluk Islam, dengan mengikuti prinsip universal keadilan Illahiyah (Islam).

Murthada Muthahari melihat bahwa selama pemerintahan di madinah, Rasulallah tidak pernah memaksakan non-muslim untuk mengikuti agama pemerintahan saat itu, bahkan melalui perjanjian di antara semua penduduk madinah, ditetapkan dasar-dasar toleransi demi terwujudnya perdamaian dan kerukunan. Salah satu isi perjanjian dengan kaum Yahudi menyebutkan ; “Orang Yahudi yang turut dalam perjanjian dengan kami berhak memperoleh pertolongan dan perlindungan ; tidak akan diperlakukan zalim. Agama Yahudi bagi orang-orang Yahudi dan agama Islam bagi orang-orang Islam. Jika ada di antara mereka berbuat zalim, itu hanya akan mencelakakan dirinya dan keluarganya⁴⁷ .

Dalam Al-Qur'an ada ayat yang menyatakan “bagi-mu agamamu dan bagi-ku agamaku”(Q.S. 109; 6), dengan demikian agama digunakan oleh Rasulallah sebagai kekuatan moral (moral force) perilaku yang religius lebih diutamakan dari pada formalitas agama.

Merlihat fakta historis ini, yang dikemukakan oleh Nurkholis Madjid bahwa sistem nilai plural adalah sebuah aturan Tuhan (sunatullah) yang tidak mungkin berubah, diubah, dilawan dan diingkari. Barangsiapa yang mengingkari hukum kemajemukan (Pluralita) budaya dan agama, maka akan timbul fenomena pergolakan yang tidak berkesudahan

⁴⁷ *Ibid*, hal- 173

berdampak negatif. dikatakan bahwa memahami pluralitas agama dan budaya adalah merupakan memahami dari agama, sebab memahami agama sama halnya memahami kebudayaan masyarakat secara menyeluruh dan jika agama dipahami secara integral dengan kondisi sosial budayanya, pada saat itu pula akan tampak dengan sendirinya mana aspek budaya yang selaras dengan agama dan mana yang tidak.⁴⁸

Langkah bijaksana umat Islam harus belajar dari kenyataan sejarah, yaitu sejarah yang mendorong terjadinya masyarakat yang plural dan integrative, agenda yang perlu dirumuskan sebuah negara plural:

1. Negara dituntut peran aktif dan positif dalam memperlakukan masyarakat dalam kehidupan keberagamaan.
2. Agama tidak dipandang sebagai mobilitas politik, tetapi agama digunakan sebagai sumber etika dalam bermasyarakat dan berinteraksi.⁴⁹

Menurut Munir Mul Khan, akibat kerentanan politik yang dengan mudah dapat dieksploitasi elit lokal untuk mengambil keuntungan bagi kepentingan sendiri. Sedangkan Yunahar Ilyas mengatakan, sebenarnya pluralitas bukanlah sesuatu yang baru dalam sejarah dunia Islam, sejarah Islam telah mengatakan masalah politik bias memicu perpecahan, tetapi perpecahan yang terjadi semata-mata bukan masalah ketuhanan. Pluralitas menjadi persoalan tatkala ditumbuhkan dengan pluralisme, dalam

⁴⁸ Republika, *Pluralitas Agama*, 2 Juli 2001. Hal - 4

⁴⁹ Dadang Khamad, *Sosiologi Agama*, hal-176

fundamental kemanusiaan kita tidak sebaik yang kita bayangkan sebagian masyarakat yang beragama dan berbudaya, krisis ekonomi, politik dan yang lainnya, hanyalah salah satu akibat kurang kuatnya dasar-dasar kemanusiaan kita.⁵²

Yang terjadi umumnya kesalahpahaman tentang agama dan bagaimana seharusnya beragama, agama sering disamakan dengan iman dan kebenaran pada dirinya agama dijadikan tujuan, bahkan manusia menggeser agama dan menempatkan pada posisi yang di Tuhankan (menuhankan agama). Jadi persoalan fundamentalisme atau fanatisme dalam suatu agama adalah baik jika pengertian agama benar-benar sebagai agama yang memebela kemanusiaan, semakin tinggi rasa kemanusiaan masyarakat yang diajarkan dalam agama.⁵³

Dosen STAB Syailendra Semarang, Hastho Bramantyo. Dari sudut pandang agama Budha mengatakan pluralitas sebenarnya merupakan sesuatu yang niscaya sehingga bukan sesuatu yang berlebihan tetapi kita tidak legawa terhadap pluralitas tersebut sehingga yang muncul akhirnya seperti yang terjadi belakangan ini pada masyarakat kita, munculnya tindakan-tindakan anarkhis dan sejenisnya, padahal pluralitas sebenarnya merupakan suatu yang wajar. Anak Agung Ngurah Wisnu Whardana dari sisi pandang agama Hindu menyatakan, hendaknya semua pihak melihat wawasan kebangsaan atau nasionalisme secara lebih luas. Yaitu jangan

⁵² *Ibid*, hal- 4.

⁵³ Kedaulatan Rakyat, *Pluralitas keagamaan*, Senin 4 November, 2002, hal- 4.

pemahaman Yunahar Ilyas ada perbedaan arti antara pluralitas dan pluralisme, pluralitas adalah mengakui keberadaan segala sesuatu yang berbeda, sedangkan pluralisme mengakui semua kebenaran yang berbeda, di sini ada penekanan antara mengakui keberadaan dan mengakui kebenaran⁵⁰.

Pluralitas pada zaman Nabi Muhamad dalam masyarakat Madinah, dalam piagam madinah, rasulallah memperlakukan semua warga negara dan semua suku sama dalam masalah hak dan kewajiban, termasuk membela dan memepertahankan negara dari serangan musuh tanpa membedakan suku, ras, dan agama, artinya dalam pembangunan masyarakat Madani di kota Madinah, Rasulallah SAW tidak pernah berusaha menafikan pluralitas, bahkan menjadikan sumber energi untuk menghidupkan kehidupan keberagamaan.⁵¹

Wawasan nasionalisme dari pandangan agama Katolik menurut Bernard Kieser Van Lith mengamanatkan perlunya mendidik pribadi jangan sampai ada yang tertindas, sebab cinta mencakup semua, sedangkan Sogijapranata menyatakan, pentingnya memadukan kelompok untuk membasmi yang membahayakan masyarakat dan negara. Menurut Djoko Prasetyo AW, krisis berkepanjangan di Indonesia sebenarnya persoalannya bukan karena bukan masalah fundamental ekonomi yang kurang kuat, tetapi mungkin harus kita sadari bahwa ternyata (terbukti)

⁵⁰ Kedaulatan Rakyat, *Wawasan Kebangsaan Dari Sudut Pandang Dan Agama*, (Senin 4 November, 20002), hal- 2.

⁵¹ Kedaulatan Rakyat, *Mencermati Tantangan Demokrasi*, (Sabtu 26 November, 2002), hal- 8.

memandang wawasan kebangsaan dan nasionalisme sekedar saling menempatkan antara satu dan lainnya, tetapi lebih dari itu yaitu bagaimana antar komponen bangsa bias saling menghargai, saling menerima, toleransi dan sebagainya.⁵⁴

Memiliki pemahaman kebudayaan dapat membantu pengembangan wawasan kebangsaan yang sehat, menurut sejarawan G Modjanto, memiliki wawasan kebangsaan yang sehat, memberi jalan bagi tumbuhnya kebangsaan yang berbudi nurani, itu berarti mendorong pewujudan kebangsaan yang anti kekerasan, menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemanusiaan yang berujung pada wawasan kebangsaan yang berpancasila.⁵⁵

Semua pihak perlu menyadari atas pluralitas yang ada dalam masyarakat Indonesia yang bias diibaratkan suatu spektrum warna di satu sisi berbeda tetapi di sisi lain sama, sebagai suatu spektrum, pengandaian juga dapat dibuat kebhinekaan seperti dua sisi yang berbeda dari satu mata uang. Di satu sisi satu mata uang, di sisi lain mempunyai dua gambar yang berbeda namun harganya sama-sama satu, tepatlah semboyan bhineka tunggal ika, karena kebhinekaannya masyarakat Indonesia

3. PPkn, Pluralitas Keagamaan dan Pendidikan Islam.

Adanya kesamaan tujuan pendidikan Garis-garis Besar Program Pengajaran PPkn dan Pendidikan agama Islam, tujuan pendidikan Islam

⁵⁴ *Ibid*, hal- 4.

⁵⁵ *Ibid*, Senin 4 November, 2002, hal- 4.

pada Sekolah Menengah Umum; Untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan peserta didik tentang keagamaan, sehingga menjadi manusia yang mulia, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, serta akhlak mulia dalam kehidupan pribadi, anggota masyarakat.

Pemahaman tentang pendidikan PPkn, pluralitas kagamaan dan pendidikan Islam, tidak terlepas dari konsep manusia Indonesia seutuhnya, mengandung pengertian bahwa manusia Indonesia adalah sosok makhluk Tuhan yang senantiasa berinteraksi dengan alam Indonesia, budaya Indonesia, dan nilai-nilai kemanusiaan serta keyakinan agama yang ada dan berkembang di Indonesia, kesadaran akan nilai-nilai Ketuhanan yang tinggi dikalangan masyarakat, menunjukan bangsa Indonesia bangsa yang religius yang tercermin dalam sikap keagamaan dan kehidupan masyarakat.⁵⁶

Ungkapan ketaqwaan pada UUD Sistem Pendidikan nasional tidak bisa dipisahkan dengan sistem nilai sosial yang dimiliki dan berlaku pada masing-masing kelompok keagamaan, dengan perkataan lain manusia Indonesia manusia yang beragama, memiliki simbol-simbol, norma dan nilai, serta corak dan tingkah laku yang berbeda-beda.⁵⁷

⁵⁶ Badan Penelitian Pengembangan, *Pluralitas Sosial*, Badan Penelitian Pengembangan Agama.PPKHUB. Jakarta 1999- 2000), hal- 1-2

⁵⁷ BPPA, *Pluralitas Sosial Dan Hubungan Antar Agama*, (Badan Penelitian Pengembangan Agama. Jakarta . 1999-2000), hal- 25

Rumusan tujuan pendidikan agama Islam pada Sekolah Menengah Umum adalah merupakan penjabaran dari bunyi pasal 2 ayat (1) dan (2). Peraturan pemerintah No. 29 tahun 1990 yang menyatakan bahwa ;

(1) Pendidikan menengah bertujuan ;

- a. Meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.
- b. Meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosialnya, budaya, dan sekitarnya.

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyelenggaraan pendidikan menengah berpedoman pada tujuan pendidikan nasional.⁵⁸

Jelas bahwa pendidikan berusaha untuk mengembangkan aspek-aspek kepribadian anak didik, baik jasmaniah maupun rohaniah, termasuk individualitas, sosialitas, maupun aspek religius, sehingga adanya keseimbangan kebutuhan fisik material dan kebutuhan mental spiritual, dan aspek pendidikan Islam tidak terlepas dari kebutuhan pokok manusia ;

- a. Kebutuhan biologis/kebutuhan jasmaniah, merupakan kebutuhan hidup manusia yang primer, seperti makan, minum, tempat tinggal, pakaian,

⁵⁸ Amin Abdullah Dkk, *Antologi Studi Islam. Teori Dan Metodologi*, DIP PTA IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2000), hal- 203

dan kebutuhan seksual. Setiap orang tentu akan memenuhi kebutuhan jasmaniah, cara pemenuhan kebutuhan itu berbeda satu dengan yang lainnya, tergantung kemampuan dan kondisi masing-masing.

- b. Kebutuhan psikis, yaitu kebutuhan rohaniah. Manusia membutuhkan rasa aman, dicintai dan mencintai, rasa bebas, perasaan untuk dihargai dan lain sebagainya. Manusia adalah makhluk “psycho-physik netral” sebagai makhluk yang memiliki kemandirian jasmani dan rohani. Dalam kemandirian itu manusia memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang dan untuk itu perlu adanya pendidikan, agar kebutuhan psikis tersebut dapat terpenuhi dengan seimbang.
- c. Kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan manusia untuk bergaul dan berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Karena manusia manusia adalah makhluk sosial (Homo Socius), yang mempunyai pembawaan untuk hidup bermasyarakat, sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai tanggung jawab sosial untuk mengembangkan berinteraksi antar anggota masyarakat. Aristoteles menamakan manusia sebagai Zoon Politicon (makhluk sosial). Yang dalam kelompoknya manusia ingin diakui status sosialnya, dan juga ingin dapat bekerjasama dengan orang lain, tetapi untuk mencapai itu semua orang harus bersikap toleran, ramah tamah, menghargai, menghormati, dan pandai menyesuaikan diri dan juga harus dapat mengadakan pengendalian diri, untuk itu perlu pendidikan.

d. Kebutuhan agama (spiritual), yaitu kebutuhan manusia terhadap pedoman hidup yang dapat menunjukan jalan kearah kehidupan duniawi dan ukhrowi, semenjak manusia dilahirkan membawa fitrah beragama seperti disebutkan dalam Al-Quran surat Ar-rum ayat 30,

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ
النَّاسَ عَلَيْهَا ... إِلَهِهِ (الرُّوم: ٣٠)

“Hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetapkanlah pada fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah tersebut. Tidak ada perubahan bagi fitrah Allah ; itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui” (S.Q Ar-rum 30).⁵⁹
Di samping ayat tersebut, juga disebutkan dalam hadits Nabi ;

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبْوَاهُ ... (الحدِيث)

“Tidak ada anak yang dilahirkan itu kecuali telah membawa fitrah (kecenderungan untuk percaya kepada Allah). Maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak tersebut beragama Yahudi, Nasrani dan Yahudi”

Bahwa fitrah beragama pada manusia telah dibawa sejak lahir dan berkembang dengan adanya pendidikan.dengan adanya fitrah tersebut manusia disebut makhluk Berketuhanan (Homo Divinans) atau makhluk beragama (Homo Religius), karena dengan adanya agama maka manusia akan mendapatkan ketenangan lahir dan batin.

e. Kebutuhan Padagogis, yaitu kebutuhan manusia akan pendidikan, disebut (Homo Educandum), makhluk yang harus dididik, karena manusia mempunyai akal, mempunyai kemampuan untuk berilmu pengetahuan

⁵⁹ Depaq, *Al-Quran Dan Terjemahan*, hal- 641.

(Homo Sapiens), di samping manusia mempunyai kemampuan untuk berkembang dan membentuk dirinya sendiri (Self- forming).⁶⁰

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa metode yaitu ;

1. Penentuan Subyek.

Peneliti memilih penentuan subyek ini yaitu informan yang pertama dari guru pembina di sekolah SMU Muhamadiyah Tujuh Bapak Drs. Ausat dan informan yang kedua yaitu dua siswa anak didik SMU Muhamadiyah Tujuh dan juga informan yang ketiga dari guru PPkn Aliyah YASALMA bapak Sunarto. SH, yang keempat informan dua siswa anak didik Aliyah Yasalma.

2. Metode Pengumpulan Data.

a. Sumber Data.

Studi kepustakaan, studi yang mencari informasi-informasi dari berbagai buku dan sejenisnya yang berhubungan dengan penelitian, sumber data tersebut terbagi menjadi dua:

1. Sumber data primer berupa: Buku pedoman GBPP kurikulum SMU 1997, Buku PPKn SMU kelas I. II. III, buku pendidikan agama Islam SMU I. II. III.
2. Sumber Data Skunder: Yaitu buku-buku sebagai pendukung yang relevan dalam menunjang penulisan ini, seperti buku ilmu

⁶⁰ Zuhairi Dkk, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Bumi Aksara, Jakarta, 1984), hal- 97.

pendidikan, Sosiologi Antropologi, Filsafat Pendidikan Islam, Ilmu-ilmu Sosial.⁶¹

b. Metode Pengumpulan data.

1. Metode observasi (pengamatan); Pencatatan langsung untuk memperoleh gambaran langsung tentang aktifitas belajar mengajar penyampaian materi PPkn di kelas, bagaimana pendidik memberikan materi PPkn, dan siswa merespon materi pelajaran PPkn yang disampaikan oleh Pendidik di kelas⁶²
2. Metode Dokumentasi ; Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan dalam penyelidikan yang ditujukan melalui sumber-sumber dokumen.⁶³ Metode ini digunakan dengan cara mengambil dokumen, majalah, arsip dan lain-lain sebagainya yang penting dan yang bisa membantu pengumpulan data-data penelitian ini.

3. Metode Analisa Data.

Penelitian ini pada dasarnya bersifat deduktif analitik, artinya mencari uraian yang menyeluruh dan cermat tentang salah satu keadaan, pendekatan yang dipakai lebih ditekankan secara kualitatif, melalui apa yang dinamakan deskriptif analitik, pendekatan kualitatif yang memungkinkan bagi peneliti langsung mencari dan mengumpulkan data

⁶¹ Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1985), hal-

⁶² T.O Ihrom, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*, (Yayasan Obor Indonesia. 1996), hal-51

⁶³ Winarno Surahman, *Pengantar penelitian ilmiah*. (Bandung: PT. Tarsito, 1989).

atau masalah yang dipelajari tanpa harus terikat untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu teori yang dikemukakan oleh para ahli.⁶⁴

Dengan demikian penelitian ini dalam mencari dan mengembangkan data tidak mengikuti petunjuk sebagaimana yang digunakan dalam penelitian kuantitatif, namun sebaliknya banyak dikuasai oleh pengembangan analisa yang muncul di lapangan, berdasarkan pendekatan rasional dan logis terhadap segala pemikiran secara deduktif dan induktif ; Deduktif analisa dari data yang masih bersifat umum dalam suatu generalisasi yang berdasarkan hubungan dan persamaan.⁶⁵ Atau suatu analisa yang berangkat dari kaidah-kaidah umum (universal) menuju hal-hal khusus. Sedangkan induktif suatu proses berfikir yang bertitik tolak dari fakta khusus, peristiwa konkrit kemudian dari fakta tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum.⁶⁶

Analisa yang digunakan lebih berusaha memecahkan masalah melalui analisa sebab akibat, yakni meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi setempat dan membandingkannya dengan faktor-faktor yang lain Dalam prakteknya dimulai dengan menganalisa peristiwa-peristiwa yang terjadi dan keterkaitannya dengan faktor

⁶⁴ Sunardi Mulyanto, *Penelitian Agama Masalah dan Pemikiran*, (Sinar Harapan Jakarta 1982), hal- 143.

⁶⁵ Anton Bakker Dan A.H. Zubair. *Metode Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hal. 10.

⁶⁶ *Ibid*, hal- 15.

penyebab yang ada, adapun analisa data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif-analitis (non statistik).⁶⁸

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi dengan judul Pengembangan GBPP. PPkn di SMU Tentang Pluralitas Keagamaan dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam, maka penulis membagi menjadi empat bab:

BAB I pendahuluan. Yang terdiri dari tujuh sub. Yang pertama Penegasan Istilah, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kajian Teoritik, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II membahas tentang Konsep Pengembangan GBPP.PPKn Dalam Pluralitas Keagamaan yang dibagi dalam empat sub pembahasan meliputi a. Konsep Pengembangan. b. GBPP.PPKn SMU c. Pelaksanaan Pembelajaran PPKn. dan d. Materi PPKn Dalam Pluralitas Keagamaan

BAB III membahas tentang Pengembangan GBPP.PPKn Dalam Pluralitas Keagamaan dan Perspektif Pendidikan Islam, yang terdiri dari tiga sub. a. Pengembangan GBPP PPKn, b. Konsep GBPP PPKn dalam Perspektif Pendidikan Islam, c. Tanggapan Masyarakat.

⁶⁸ Winarto Surachmadi, *Pengantar Penelitian Ilmiah*....hal- 142

BAB IV sebagai penutup dari pembahasan penelitian skripsi ini, berisi kesimpulan yang telah dibahas dalam pembahasan bab sebelumnya, dan berisi saran-saran dan di akhiri dengan penutup.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Setelah penyusun mengemukakan pengembangan pluralitas keagamaan yang terkandung dalam materi PPkn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) di sekolah SMU (Sekolah Menengah Umum) yang dianalisis dengan Ilmu Pendidikan agama Islam, Maka Penyusun dapat mengambil kesimpulan nilai-nilai pluralitas keagamaan yang terdapat dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ;

- a. Membawa misi nilai-nilai pendidikan moral terhadap anak didik.
- b. Hubungan persaudaraan dalam kehidupan majemuk di masyarakat perlu adanya moralitas, moralitas bukanlah sekedar sebagai sebuah kepercayaan atau keyakinan, atau norma, akan tetapi sebagai nilai-nilai yang dimiliki peserta didik.
- c. Pendidikan sosial, yaitu pendidikan kemasyarakatan, pendidik memberikan pengertian dan mengarahkan potensi yang terdapat pada anak didik, sikap toleransi, tenggang rasa, saling menghormati.
- d. Menegakkan persaudaraan dan memberikan rasa kebersamaan dalam melaksanakan tanggungjawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik antara sesama muslim maupun antar umat beragama yang lain harus saling menghormati hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik.

- e. Adanya dialog antar umat beragama baik antara Islam, Kristen, Hindu, Buda dan yang lainnya. Sebagai jalinan tali persaudaraan antar umat beragama. Dapat saling memahami perbedaan dan persamaannya, dan dialog antar umat beragama sebagai jembatan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. Saran-saran

Pada saat ini wawasan kebangsaan terjadi kekaburan makna baik dalam pendidikan maupun dalam keagamaan pada masyarakat Indonesia, dan menjalar hingga pada krisis multi dimensi, dimulai dari krisis keagamaan dan hubungan antar umat beragama, dan terjadi kemunduran persaudaraan antar suku dan etnis yang menonjolkan keakuannya. Sehingga terjadi dekadensi moral yang terjadi dalam masyarakat kita, hal ini harus kita pertanyakan kembali wawasan kebangsaan kita sebagai warga negara dalam bernegara. Hal ini menjadi pukulan bagi dunia pendidikan terlebih lagi bagi proses keagamaan kita dalam pluralitas keagamaan, karena secara tidak langsung kegagalan dunia pendidikan dan proses keagamaan dalam masyarakat Indonesia, hal ini harus menjadi sorotan bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia. dalam pendidik moral masyarakat kita selama ini.

Sehingga perlu adanya rekonstruksi ulang dalam pendidikan di negara Indonesi, karena selama ini pendidikan kita baru sebatas teori-teori yang terdapat dalam buku-buku, sehingga perlu adanya kajian-kajian yang lebih

Saran terakhir dari penyusun, perlu adanya rekonstruksi dan mereduk ulang kembali konsep dalam dunia pendidikan, serta memecahkan permasalahan yang timbul dalam dunia pendidikan, adanya perhatian yang khusus pendidikan moral terhadap peserta didik. Terbinanya peserta didik dengan baik, maka perlu adanya pendidikan berbasis masyarakat yang sesuai dengan budaya lokal, sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu menjadi manusia Indonesia seutuhnya (pribadi yang Insan Kamil), dan menjadikan bangsa yang kuat dan berdiri sejajar diantara bangsa-bangsa lain.

C. Kata Penutup.

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT. Karena hanya dengan petunjuk dan ridho-Nya karya skripsi ini dapat penulis selesaikan, meskipun penulis sadar bahwa skripsi ini banyak sekali terdapat kekurangan dan jauh dari pada kesempurnaan. Namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kebaikan dan kesempurnaan lebih lanjut.

Akhirnya penulis berdo'a semoga Allah SWT meridhai dan memberikan hidayah dalam setiap langkah dan gerak-gerik dalam hidup kita semua. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin HM, *Studi Agama Normativitas Atau Historisitas*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996.
- Al- Abrasy, Athiyah, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta,
- An-Nahlawi, Abdurahman, *Perinsip-Perinsip dan Metode Pendidikan Islam*, Diponegoro, Bandung, 1992.
- Badan Penelitian Pengembangan Agama, *Pluralitas Sosial Dan Hubungan Antar Agama*, PPKHUM, Jakarta. 1999.
- Bakker, Anton Dan A.H. Zubhair, *Metode Penelitian Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta, 1990.
- Bakker, Anton, *Metode-metode Filsafat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Badan Wakaf, Jakarta, 1995.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, GBPP PPkn SMU. 1997
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *PPkn SMU.I.II.III*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.
- Haddad, Habib Abdullah, *Nasehat Agama dan Wasiat Iman*, Gema Risalah Press, .. Bandung, 1993.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research Jilid I*, Andi Ofset, Yogyakarta, 1990.
- Hamdani. Ali, *Filsafat Pendidikan*, Penerbit Kota Kembang, Yogyakarta, 1986
- Jawa Pos, Surabaya, 2003
- Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, 2000
- Khamad, Dadang, *Sosiologi Agama*, Penerbit Rosda Bandung, Jakarta, 2000
- Kompas, Jakarta, 2003

- Legenhausen Muhammad, *Satu Agama atau Banyak Agama "Kajian Tentang Liberalisme dan Pluralisme Agama"*, Lentera, Jakarta, 1999.
- Majid, Nurkholis, *Wacana Keagamaan Dan Politik*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1999.
- Mukti, Ali, *Metodologi Penelitian Agama ; (Suatu Pengantar Menuju Pengembangan Metodologi Penelitian Agama)*, Al-Jamiah, No.12/1976, Yogyakarta IAIN Sunan Kalijaga
- Mulkhan, Munir . A, *Paradigma Intlektual Muslim*, Sipress. Yogyakarta, 1993
- _____, A, *Teologi Kebudayaan dan Demokrasi Modern*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1993.
- Mulyanto, Sumardi, (ed), *Penelitian Agama ; Masalah dan Pemikiran*, Harapan, Jakarta, 1981
- Nasution, Harun H, *Islam Rasional*, Mizan Bandung, 1995
- Nata, Abbudin H, *Metode Studi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1992
- Pulungan Suyhuti, *Prinsi-prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Quran*, Raja Grafindo Persada Jakarta. 1994
- Pusat, Bp-7, *Pancasila Sebagai Ideologi*, Perum Percetakan Negara R.I. Jakarta,
- _____, *UUD Pedoman penghayatan Dan Pengamalan Pancasila*, Bp-7 Pusat, Jakarta, 1996.
- Ratna Ningtyas, Neiny, *PPkn SMU Kls III*, PT Grafindo Media Pratama Persada: Jakarta, 1992.
- Shihab, Alwi, *Islam Inklusif "Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama"*, Mizan, Bandung, 1999.
- Shihab, Quraish, *Islam Inklusif*, Mizan, Bandung, 1999.
- Suardi, Abu Bakar Dkk, *PPkn SMU I*. Yudistira, Jakarta, 1994.
- Surachmad, Winarto, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 1994.
- Thalib, M, *Pendidikan Agama Islam SMU*, Kota Kembang Yogyakarta, 1996
- Tilaar, H.A.R, *Pendidikan Kebudayaan Dan Masyarakat Madani Indonesia "Strategi Refprmasi Pendidikan Nasional"*, Rosda, Bandung, 1999.